

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan*. Alumni. Bandung.1999.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta. 2002.

Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Cipta Jaya, 2006)

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Gafika, Jakarta

Bachtiar Effendi. *Pendaftaran Tanah di Inonesia dan Peraturan Pelaksanannya*. Alumni. Jakarta. 1993.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Budi Winarmo. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*. Perpustakaan STIA LAN. Makassar. 2012.

Cornelis Van Vollen Hoven, 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Yogyakarta: STPN Press.

Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.

Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Gramata Publishing. Bekasi. 2015.

- H.L.A. Hart. *The Concept of Law*. (terjemahan M. Khozim). Nusamedua Bandung. 2010.
- H.M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021.
- K. Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1980.
- Moh Mahfud MD. *Mendudukan soal Ultra Petita*. Kompas. Jakarta. 2007.
- Mustofa dan Suratman. *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- R.M. Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika. Jakarta. 1988.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press. Malang. 2018.
- Soelarman Brotosoelarno. *Aspek Teknis Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997*. Deputi BPN Pusat Yogyakarta. Yogyakarta. 1997.
- Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Alumni. Bandung. 2004.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tahapan

Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan

C. Tesis

Bobby Fitriansyah. *Sertifikasi Tanah yang dikuasai Negara yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2017.

Yanis Maladi. *Signifikansi Sosial Pendaftaran Tanah di Resort Wisata Selong Belanak Pulau Lombok*. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya. 1998.

D. Jurnal

Al Araaf Ode Pota, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan BatuLapisi Kabupaten Gowa", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 4 No. 2. 2022.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i2.684>

- Andi Nur Sabhranah, “*Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi*”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5, Issue 4. 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.573>
- Andi Erwin Hamzah, “*Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat Di Kabupaten Teluk Wondama*”, *Papua Law Jurnal*, Volume 7 No. 2. 2023. <https://doi.org/10.31957/plj.v7i2.2801>
- Dian Aries Mujiburohman. *Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak yang Telah Berakhir*. Bhumi. Vol. 2 No. 2. 2016.
- Dono Doto Wasono. “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak).” *Jurnal Nestor*. Universitas Tanjungpura, 2017. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22568>.
- Gunanegara. “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah.” *Law Review XXI*, no. 3 (2022): 341.
- Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. *Tunas Agraria*, 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>
- Luthfi, A. N. (2019). Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140–163. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>

- Mahmul Siregar. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 27 No. 4. 2008.
- Maufiroh, Putri, Bagus Renata Rachman, and Ety Purnaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021." *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 4 (2021): 191–96.
<https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3101>.
- Muh Zein Thalib. "Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam adjRangka Pendaftaran Tanah." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 1 (April 30, 2019): 91–105.
<https://doi.org/10.32529/Yustisiabel.V3I1.325>.
- Mujiburrohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Telantar. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 1- 22. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.168>
- Nurfaiziya, S. (2021). Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 107–118.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.727>
- Nurdin, I. (2018). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 82–97.
<https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.228>
- Pratama, Ario Aditia. "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Surat, Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Tanah, Keterangan

Tanah Dalam Pendaftaran Lengkap, Sistematis (Studi Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat).” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018.

Ramasari, Risti Dwi, and Shella Aniscasary. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021.” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 186–99.

Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>

Ronsumbre, Markus Metusalach. “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.” *Atmajaya Yogyakarta*, 2013.

Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>

Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Completion of Legal Disputes Against Holders of Certificate of Rights Certificate With Double.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.

Saskara, Komang Deva Aresta, and I Gede Pasek Eka Wisanjaya.

“Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah.” *Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 961–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p05>.

Septiawan, Rakhmat. “Karakter Hukum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Menurut Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15. I/IV/2016.” Sriwijaya, 2019.

Sri Susyanti Nur. *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah*. Jurnal Hasanuddin Law Review. Volume. 1 Nomor. 1. 2015.

Suhardi. “Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas Tanah Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4 2 (2018).

Syahyuti, “*Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 24 No. 2 Juli 2006, hal 14. <https://dx.doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27>

E. Website

Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>, (02/04/2011), diakses pada 20 Desember 2022.

Sudut Hukum. “*Perlindungan Hukum*”. 2015.
<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses
20 Oktober 2023

F. Hasil Wawancara

Wartawan, 26 September 2021, Mantan Kepala Desa Lampoko,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Abdul Rasyak, 05 Januari 2024, Kepala Desa Lampoko, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Sendri, 14 Januari 2024, Wakil Kepala Seksi bidang Pendaftaran Tanah di
BPN Polewali Mandar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/011/PL/DPMPTSP/II/2024

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. S. YAZIDUL BUSTAN AHMAD
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-011/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2024, Tgl.04-01-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : S. YAZIDUL BUSTAN AHMAD
NIM/NIDN/NIP/NPn : B022211044
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Fakultas : -
Jurusan : MAGISTER KENOTARIATAN
Alamat : TAMMUA KEC. TALLO
KOTA MAKASSAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2024 dengan proposal berjudul "KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK PENGUASAAN TANAH GARAPAN OLEH MASYARAKAT LOKAL YANG BERADA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal, 4 Januari 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

INENGAN TRI SUMADANA, AF, M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760522 199412 1 001

Tembusan :

1_Unsur forkopin di tempat



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Jl. Tritura No. 10 Kab. PolewaliMandar ☎ (0428) 21757 e-mail: kab-polewalimandar@atrpn.go.id

Nomor : UP.02.03/719-76.04/XII/2023 Polewali, 28 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 8328/UN4.5.1/PT.01.04/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin kepada Saudara S. Yazidul Bustan Ahmad, Nomor Pokok B022211044 Program Magister (S2) Kenotariatan, untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dengan judul penelitian Kepastian Hukum Atas Hak Penguasaan Tanah Garapan Oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Polewali Mandar,

Ditandatangani secara
Elektronik

Bambang Iriyanto, S.Kom
NIP. 19790827 200804 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



